



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BALI
UNIT KERJA : DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NI WAYAN NETTY ARWATI ADI
2. Jabatan : ANALIS KELEMBAGAAN KURSUS DAN PELATIHAN/BPG
3. NHK : 922537

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 750.000.000

1. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KLUNGKUNG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 58 m2/58 m2 di KAB / KOTA GIANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 29.000.000

1. MOTOR, HONDA L1F02N36L1A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000
2. MOTOR, HONDA ACB2J21B02A/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 6.099.740

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 785.099.740

III. HUTANG Rp. 372.130.584

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 412.969.156

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.